

Sinkronisasi Kebijakan Negara dan Kreativitas Pelaku

UMKM di Tengah Covid-19

(Opini Rakyatpos, 5 Mei 2020)



Yolla Amelia
Mahasiswa FH UBB

Menurut Inna Primiana, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumberdaya manusia. Dalam arti ini, mengindikasikan bahwa UMKM mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia dengan melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. UMKM yang seharusnya bisa menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat dan menopang keberlangsungan hidup harian para pelakunya.

Saat ini, para pelaku UMKM sendiri sedang mengalami ancaman yang serius akibat dari pandemi Covid -19 yang kian berkepanjangan. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) di beberapa daerah yang membatasi segala lini kegiatan masyarakat diluar rumah termasuk dalam hal perdagangan yang sekiranya menimbulkan kerumunan orang pun menjadi sebuah ancaman serius bagi para pelaku UMKM yang menggantungkan kehidupannya terhadap proses jual beli. Sedikit orang yang melakukan transaksi jual beli, maka akan sedikit juga pemasukan yang ada, bahkan bisa tidak sama sekali. Jika sudah seperti ini bukan tidak mungkin para pelaku UMKM bisa dikatakan tidak ada pemasukan harian

sama sekali, dan hanya menggantungkan kehidupan sehari – hari dari sisa uang tabungan yang dimiliki atau mengharapkan bantuan pemerintah dan berbagai pihak untuk menopang hidup. Hal ini kian menjadi momok serius, pasalnya tidak setiap pelaku UMKM memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari – harinya, sehingga menjadi persoalan signifikan yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Sampai pandemi ini, dapat diselesaikan secara tuntas dan bisa memulai lagi usahanya, para pelaku UMKM hanya dapat menunggu bantuan yang ada di tengah carut marut keadaan seperti ini.

Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UKM RI, jumlah pelaku UMKM saat ini, lebih kurang sekitar 63 juta unit UMKM, yang artinya ada sekitar jutaan pelaku UMKM yang terancam tidak memiliki pemasukan untuk menopang kehidupannya sehari – hari. Padahal UMKM adalah salah satu motor penggerak roda perekonomian masyarakat. Hal ini juga memiliki dampak dalam sektor ekonomi nasional, jika tidak dicermati dengan baik oleh pemerintah pusat.

Dalam menyikapi hal ini Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan Oritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19. Hal tersebut diperuntukan kepada para UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Hal ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah demi mempertahankan UMKM di Negeri ini, agar masih tetap bisa bertahan di tengah pandemic. Namun sekali lagi hal yang perlu diperhatikan adalah melonggarkan relaksasi kredit bank yang diberikan, bukan berarti dapat menyokong dan menjamin kehidupan sehari – hari. Hal tersebut hanya mengurangi beban pengeluaran saja. Menyikapi hal – hal semacam ini, para pelaku UMKM haruslah dituntut untuk lebih sedikit berinovasi agar dapat bertahan di tengah situasi yang tidak memihak ini, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi media sosial yang ada, dan di tengah kondisi seperti ini rasanya tidak mungkin untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Oleh karena itu, para pelaku UMKM hendaknya beralih dengan menggunakan transaksi virtual, yang pasti ramai dikunjungi oleh sebagian besar orang. Dengan memasarkan produk – produk di media sosial diharapkan pelaku UMKM masih

dapat bertahan dan memiliki pemasukan untuk menyongsong kehidupan setidaknya sampai Pandemi Covid – 19 ini berakhir.

Selain itu, pelaku UMKM juga dapat mengembangkan sayap bisnisnya dengan menyediakan kebutuhan – kebutuhan krusial di tengah pandemik ini seperti masker, handsanitizer, sarung tangan dan lain sebagainya guna menambah pemasukan agar tetap bisa bertahan. Di sisi lain pelaku UMKM di bidang Agraria pun dituntut untuk lebih ekstra dalam menyediakan bahan makanan pokok yang amat dibutuhkan. Pemerintah juga harus bijak dalam memanfaatkan UMKM dibidang Agraria, agar tidak terjadi kerugian akibat hasil panen yang tidak laku dipasaran. Dalam hal ini, Peran Pemerintah amatlah besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, baik Pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM sedang sangat diuji saat ini, bagaimana pun pelaku UMKM adalah salah satu motor penggerak roda perekonomian Negara yang harus diperhatikan betul agar masih bisa dan tetap berjalan, karena matinya UMKM memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian bangsa. Bagaimana tidak, ada sekitar 63 juta Pelaku UMKM yang terkena dampak dari Covid-19 jika setengah saja mengalami gulung tikar, maka akan ada jutaan pengangguran baru yang bisa memperburuk kondisi ekonomi Negara. Oleh karenanya sinkronisasi kebijaksanaan Negara dan kreativitas para pelaku UMKM di tengah Pandemi ini, sangat amat diperlukan demi menjaga kestabilan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakatnya di tengah Covid-19. (***)